Bab II
Tinjauan Umum Diskominfo

.

2.1 Sejarah Diskominfo

Pada awal keberadaannya Diskominfo ini dikenal dengan nama Pusat Pengolah Data (PUSLAHTA), berada pada naungan pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. PUSLAHTA ini mulai berdiri sejak tahun 1977 karena adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Keberadaan PUSLAHTA ini diresmikan pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78.

Setelah berjalan kurang lebih 14 tahun akhirnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1992akhirnya Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan, dan segala wewenangnya dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Pada tanggal yang sama dikeluarkan pula surat keputusan yang berisi pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE).

Akhirnya pada akhir tahun 2000 berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat ditetapkanlah Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA yang merupakan pengembangan dari keberadaan Kantor Pengolahan Data Elektronik, sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 maka Bapesitelda Provinsi Jawa barat diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang disingkat menjadi Diskominfo Perubahan ini dilakukan seiring dengan kenaikan tingkat dan ruang

lingkup serta cakupan kerja yang lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga khususnya di bidang teknologi informasi. Dengan *platform* dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012. Dengan terwujudnya Jabar Cyber Province Tahun 2012 diharapkan akan ada banyak manfaat yang diperoleh, diantaranya :

- Bagi Pemerintah Daerah :
  - Memudahkan komunikasi antar unit kerja;
  - Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data;
  - Mewujudkan efisien, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- Bagi Masyarakat :
  - Kemudahan akses internet untuk beraktifitas;
  - Mendapatkan layanan yang lebih mudah;
  - Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Program utama Diskominfo adalah pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan tugas pokok dari keberadaan Diskominfo adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Fungsi tugas pokok ini adalah untuk :

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
b. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, serta komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

2.1.1 Visi dan Misi Diskominfo

Visi Diskominfo adalah terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien.

Misi Diskominfo Adalah :

- Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesinalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informatika pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
- Mewujudkan layanan *online* dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi da Komunikasi serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

2.2 Profil Diskominfo

2.2.1 Profil Diskominfo

Nama instansi	**:**	Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa barat
Tgl/Thn Berdiri	**:**	1977
Jenis Badan/Instansi	**:**	Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Barat
Alamat Instansi	**:**	Jl. Taman Sari no. 55 Bandung
Telepon	**:**	(022) 2502898
Fax	**:**	(022) 2511505
Situs Web	**:**	Diskominfo.jabarprov.go.id

2.2.2 Bidang Instansi

Diskominfo merupakan instansi pemerintahan dengan program utama dari Diskominfo adalah pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Program yang sekaligus menampung kegiatan-kegiatan berbasis TIK, termasuk tiga inisiatif kegiatan yang menjadi fokus utama Diskominfo, yaitu :

- Inisiatif Jabar *Cyber Province*, yang antara lain diimplementasikan dalam kegiatan Akselerasi Jabar Cyber Province melalui pengembangan Inkubator dalam e-Government.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang antara lain diimplementasikan dalam kegiatan Dukungan Operasional LPSE Regional Jawa Barat.
- Satu Data Pembangunan Jawa Barat, yang antara lain diimplementasikan dalam kegiatan Penyiapan pusat data Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berbasis TIK.

2.2.3 Bentuk Dasar Hukum

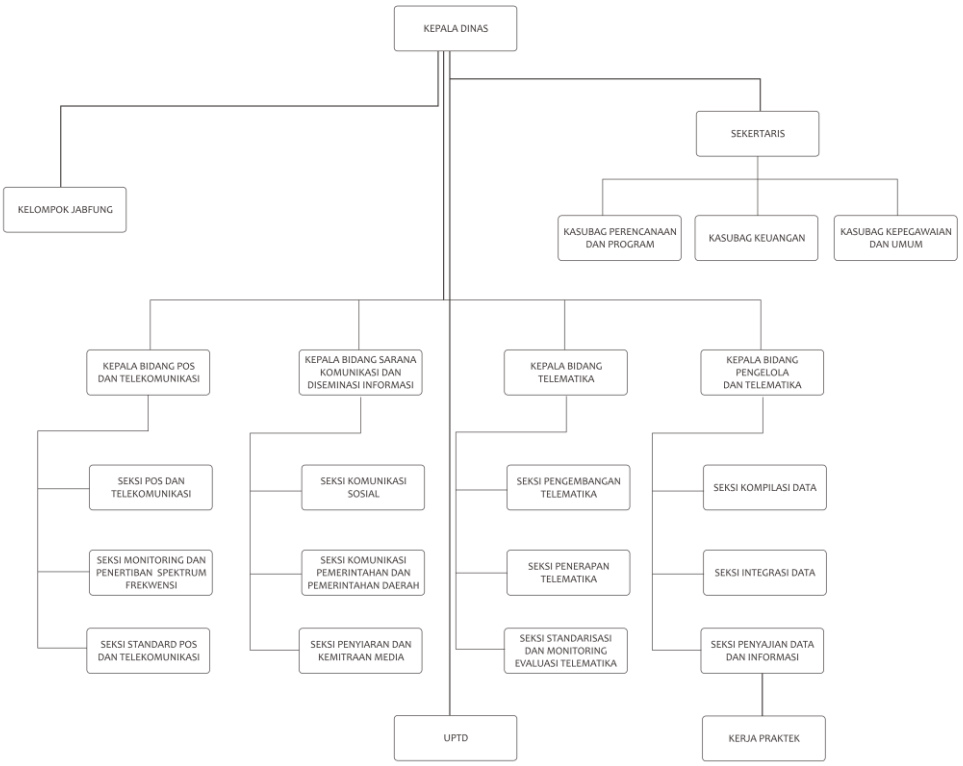
Diskominfo merupakan Instansi pemerintah yang menduduki peringkat ke 20 di jajaran instansi pemerintahan dan terbentuk berdasarkan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diantaranya :

- Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh suatu organisasi, terutama organisasi formal. Melalui struktur organisasi yang baik dapat menunjukan suatu pembagian tugas yang jelas dan tepat dalam menempatkan pegawai untuk menghindari tidak tepatnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pembagian tugas dalam suatu organisasi perlu diadakan dan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Struktur organisasi di Diskominfo adalah sebagai berikut :



Tabel II.1 Struktur Organisasi

(sumber : bagian kepegawaian Diskominfo)